



Ilustrasi: Parama Bisatya

Biarkan Kami Bermain: Siklus Orientasi Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada¹

“Organisasi Balairung—seperti komitmen pendirian pertama—bukan tempat orang bekerja mencari uang, bukan pusat pelatihan untuk melahirkan wartawan profesional, bukan pula tempat melakukan afiliasi politik terhadap kekuatan tertentu. Sejak awal, kami memilih jalan intelektual dengan mobilitas holistik.”

—Balairung, Nomor 7/Tahun III/ 1989

Prolog

Sejarah pers mahasiswa adalah sejarah tentang ketegangan identitas. Di satu sisi, identitas pers mahasiswa bertarung di atas medan pendekatan substansial, yaitu dualisme antara pendekatan jurnalistik dan pendekatan ilmiah. Di sisi lain, identitas pers mahasiswa bertarung di atas medan jangkauan spasial, yaitu kontestasi antara cakupan

1. Biarkan Kami Bermain adalah judul “antologi puisi sosial mahasiswa” yang diterbitkan oleh Balairung pada Oktober 1987. Judul diambil dari puisi oleh Yayan Sopyan.

intrakampus dan cakupan ekstrakampus. Ketegangan ini tidak lepas dari dualisme identitas yang dimiliki pers mahasiswa, yakni identitas sebagai jurnalis dan mahasiswa. Menurut Arifin, sebagai jurnalis, pers mahasiswa dituntut untukewartakan sebuah peristiwa secara konsekuen dan independen.² Sementara itu, sebagai mahasiswa, pers mahasiswa dituntut menjadi pelopor perubahan dan pemecah kebekuan. Dalam lintasan sejarah, dualisme identitas menubuh di atas struktur sosial-politik yang dinamis. Itu sebabnya, setiap identitas berkelindan mengisi pemberitaan pers mahasiswa seiring perubahan struktur sosial-politik tersebut. Hal ini tidak kalis bagi *Balairung*, pers mahasiswa generasi ketiga di Universitas Gadjah Mada (UGM), sejak kemunculan dua generasi pendahulunya.

Meminjam istilah Ni'am, sejarah pers mahasiswa di UGM tercacah menjadi tiga generasi, yaitu *Gajah Mada* dan *Gama*, *Gelora Mahasiswa*, serta *Balairung*.³ Biar pun tidak keliru, tampak pembabakan tersebut terlalu menyederhanakan sejarah sebagai permasalahan artifisial. Pada kesempatan lain, untuk memahami sejarah pers mahasiswa di Indonesia, Abar dan Utomo menggunakan konsep konvergensi dan divergensi. Konvergensi merupakan fase ketika negara melakukan identifikasi terhadap berbagai kelompok untuk diajak berkolaborasi, tak terkecuali pers mahasiswa.⁴ Divergensi merupakan fase ketika negara berubah menjadi otoriter. Namun, analisis berdasarkan orientasi kelas penguasa tampak terlalu mengandung bias negaracentris. Analisis semacam itu hanya mencerminkan realitas pers mahasiswa yang tidak lebih dari

resipien, bukan agen, dalam transformasi sosial-politik di Indonesia. Padahal, perubahan orientasi pers mahasiswa tak melulu dikondisikan oleh orientasi kelas penguasa. Dalam berbagai kesempatan, pers mahasiswa, dalam batas-batas tertentu, justru mengondisikan struktur sosial-politik di Indonesia.

Sejarah pers mahasiswa harus dipahami secara berimbang sebagai hubungan dialektis antara struktur dan agen. Struktur sosial-politik, di satu sisi, mengondisikan substansi pemberitaan pers mahasiswa. Di sisi lain, pers mahasiswa turut memberikan kontribusi dalam perubahan sosial-politik di aras nasional. Oleh karena itu, tulisan ini akan membagi sejarah pers mahasiswa di UGM melalui siklus orientasi, konsolidasi, dan proliferasi. Periode orientasi merupakan fase ketika pers mahasiswa masih meraba-raba bentuk ideal tanpa rencana terukur jangka panjang yang signifikan terhadap situasi sosial-politik nasional. Periode konsolidasi merupakan fase ketika pers mahasiswa melompat keluar dari sekat-sekat komunitas untuk terlibat dalam agenda dekonstruktif di aras yang lebih luas. Sementara itu, periode proliferasi merupakan fase ketika pers mahasiswa kembali ke kampus, baik karena kesadaran sendiri maupun pembatasan oleh kekuasaan. Melalui kerangka ini, sejarah pers mahasiswa di UGM dapat dibagi menjadi tiga generasi, yaitu generasi siklus putaran pertama, generasi siklus putaran kedua, dan generasi siklus putaran ketiga, yang masih berlangsung sampai saat ini.

I. Generasi Pertama (1950—79)

2. Luqman Hakim Arifin, "Cerita Panjang dari Lombok," *Balairung*, Edisi 32/Tahun XV/2000, 83–86.

3. M. Lubabun Ni'am Asshibammal S., "BALAIRUNG dan Sejarah yang Tercacah," *Balairung*, Edisi 44, 2011, 182–190.

4. Wisnu Prasetya Utomo, *Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2013), 21.

Periode Orientasi: Gadjah Mada dan Gama, 1950—68

Generasi pertama pers mahasiswa di UGM ditandai dengan kemunculan majalah *Gadjah Mada* pada April 1950. *Gadjah Mada* adalah majalah yang diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa UGM. Gagasan menerbitkan majalah muncul dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan senat mahasiswa dari berbagai fakultas pada 11 Januari 1950. Pertemuan tersebut, antara lain, melahirkan pendirian mahasiswa UGM “untuk turut serta menyumbangkan segala tenaga dan pikiran dan turut bertanggung jawab penuh atas penyempurnaan bentuk dan isi Universitas Gadjah Mada”.⁵ Bertolak dari pendirian tersebut, mereka sepakat untuk menerbitkan majalah *Gadjah Mada*. Orientasi majalah tersebut dituangkan dalam kata pengantar redaksi pada terbitan perdana:

“Kami hendak mendekatkan, menyatukan hidup dan dunia Universitas Gadjah Mada ini dengan bangsa dan masyarakat Indonesia. Kami hendak meluaskan hubungan kami dalam arti kebudayaan yang luas dengan dunia mahasiswa di seluruh dunia, khususnya di dunia Timur”.⁶

Pernyataan ini menunjukkan orientasi pemberitaan *Gadjah Mada* yang berada pada identitas ilmiah dan ekstrakampus. Orientasi tersebut tampak dari slogan yang tertera di halaman sampul, yaitu “Berhaluan Pengetahuan Umum”. Oleh karena itu, topik bahasan majalah merentang dari persoalan politik, ekonomi, sosial,

budaya, pendidikan, hingga olah raga. Namun, tampaknya, Dewan Mahasiswa UGM tak puas dengan topik bahasan yang terlalu melambung tinggi. Sebagai alternatif, sejak Desember 1950, mereka sepakat untuk menerbitkan majalah *Gama*. Berbeda dengan *Gadjah Mada*, *Gama* cenderung mewartakan peristiwa yang terjadi di dalam kampus, walaupun persoalan umum seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya tidak jarang muncul. Slogan mereka pun tampak jelas menggambarkan orientasi tersebut, yaitu “Gema Intrauniversiter”. Orientasi tersebut mewujudkan dalam rubrikasi seperti “Obiter Dictum”, “Lensa Gama”, “Who’s Who”, dan “Universitaria”.

Secara bertahap, pers mahasiswa generasi pertama berusaha meretas orientasi spasial ekstrakampus. Pada 19 Maret 1955, *Gama* mengirimkan surat kepada para pengelola majalah mahasiswa di seluruh Indonesia. Surat tersebut bertujuan untuk menjajaki peluang menyelenggarakan konferensi pers mahasiswa di Indonesia. Gayung bersambut, Konferensi Pers Mahasiswa Indonesia I berhasil diselenggarakan di Yogyakarta pada 8 Agustus 1955. Seperti dicatat Zakaria Idris dalam Siregar, konferensi tersebut dihadiri oleh sepuluh perwakilan majalah mahasiswa, yaitu *Gama*, *Gadjah Mada*, *Criterium*, *Media*, *Vivat*, *Ta Hsueh Ta Chih*, *Mahasiswa*, *Intelegensia*, *Duta Mahasiswa*, dan *Fiducia*.⁷ Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI) bagi pegiat pers mahasiswa dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI) bagi lembaga pers mahasiswa. Dalam

5. *Gadjah Mada*, Tahun 1, Nomor 1, April 1950.

6. *Gadjah Mada*, Tahun 1, Nomor 1, April 1950.

7. Amir Effendi Siregar, *Patah Tumbuh Hilang Berganti*, (Jakarta: Karya Unipress, 1983), 41.

konferensi tersebut, Teuku Jacob terpilih sebagai Ketua IWMI. Sementara itu, Nugroho Notosutanto terpilih sebagai Ketua SPMI.

Pada tahap berikutnya, orientasi spasial ekstrakampus, secara kelembagaan, melontar jauh seiring keikutsertaan IWMI dan SPMI pada Konferensi Pers Mahasiswa Asia I di Manila pada Februari 1957. Dalam konferensi bertajuk “Asian Student: Its Responsibilities, Problem and Role in Nation Building” tersebut, Nugroho Notosutanto dan Koesnadi Hardjasoemantri bertindak sebagai ketua dan anggota delegasi Indonesia. Dalam konferensi tersebut, Nugroho berpendapat tentang perbedaan substansial antara pers mahasiswa di negara maju dan negara berkembang.⁸ Menurutnya, meskipun prasarananya memadai, pers mahasiswa di negara maju membatasi fungsinya sebagai media komunitas (*community newspaper*) di lingkungan kampus. Hal ini berbeda dengan pers mahasiswa di Indonesia pada 1950-an, yang merasa tidak kalah dengan pers umum.

Pada pengujung masa Demokrasi Liberal, IWMI dan SPMI mulai menimbang bahwa pegiat dan lembaga tidak perlu benar dipisahkan. Oleh karena itu, pada Konferensi Pers Mahasiswa Indonesia II, Juli 1958, IWMI dan SPMI sepakat untuk melebur. Organisasi baru tersebut kemudian diberi nama Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). Perubahan ini menandai era baru pers mahasiswa yang secara organisasional lebih matang,

tetapi dipaksa tumbuh dalam suasana sosial-politik yang mengerikan. Siregar mencatat bahwa pada periode Demokrasi Terpimpin, sebagian pers mahasiswa mengalami kemunduran. Hal ini ditandai dengan serangkaian pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Meskipun begitu, narasi sejarah dalam rentang periode tersebut harus ditelaah kembali secara kritis. *Gadjah Mada* dan *Gama*, seperti dicatat Suwondo, masih bertahan sampai 1968.⁹ Musabab kematian *Gadjah Mada* dan *Gama* tidak pernah jelas. Namun, menimbang situasi sosial-politik saat itu, Suwondo menduga bahwa kematian majalah tersebut disebabkan Peristiwa G-30-S yang berlanjut peralihan kekuasaan dari Sukarno menuju Soeharto.¹⁰ Sementara itu, seperti akan dijelaskan di bawah, pada saat bersamaan, beberapa pers mahasiswa justru sedang naik tirus. Hal ini mengindikasikan perebutan hegemoni secara masif turut mengondisikan orientasi pers mahasiswa.

Periode Konsolidasi: Absensi UGM, 1965—74

Menjelang konsolidasi kekuasaan Orde Baru, sejumlah terbitan mahasiswa bermunculan. Tiga di antara terbitan mahasiswa paling monumental adalah *Harian KAMI* (1965), *Mahasiswa Indonesia* (1966), dan *Mimbar Demokrasi* (1966). Dalam catatan sejarah, yang cenderung romantis, periode ini didaulat sebagai masa keemasan pers mahasiswa. Klaim ini, pada umumnya, merujuk pada oplan ketiga media yang melaju pesat menyaingi pers umum. *Harian KAMI*, misalnya, selama masa transisi

8. Siregar, 42.

9. Tirta Suwondo, *Karya Sastra Indonesia dalam Majalah Gadjah Mada dan Gama*, (Yogyakarta: Balai Bahasa Yogyakarta, 2006), 12–13.

10. Suwondo, 13.

pemerintahan dari Sukarno menuju Soeharto pada 1966–67, pernah memiliki oplah mencapai 70.000 eksemplar.¹¹ Jumlah tersebut lebih besar dari *Kompas*, yang pada 26 Juni 1969, tercatat memiliki oplah sebesar 63.747 eksemplar.¹² Orientasi pemberitaan pun, secara tegas, memosisikan diri berseberangan dengan pemerintahan Sukarno. Dalam konteks ini, ketegangan identitas merenggang pada posisi jurnalistik-ekstrakampus.

Selain didaulat sebagai masa keemasan pers mahasiswa, periode 1965 sampai awal 1970-an menandai dimulainya periode konsolidasi tatanan baru. Pada fase ini, aktor-aktor yang terlibat dalam proses konsolidasi, termasuk pers mahasiswa, secara serentak memberikan resistensi terhadap mereka yang dianggap musuh tatanan baru, dalam hal ini Sukarno dan komunisme. Oleh karena itu, kebesaran pers mahasiswa dapat diasumsikan sebagai implikasi strategi kemitraan yang dijalankan mahasiswa dengan militer dan aktor-aktor lain yang terlibat dalam konsolidasi. Kepentingan tersebut, bersama dengan karakteristik aktivisme mahasiswa yang meledak-ledak, menjadikan substansi terbitan mahasiswa memiliki daya tawar dibandingkan pers umum yang lebih berhati-hati.

Selama pers mahasiswa santer diklaim mengalami masa keemasan, pers mahasiswa di UGM justru tiarap. Pasca-1968 sampai 1974, praktis tidak ada terbitan mahasiswa tingkat universitas yang beredar di UGM. Meskipun begitu, sejumlah pers mahasiswa tingkat fakultas mampu bertahan hidup, seperti

Clapeyron, Equilibrium, Sintesa, Primordia, dan *Medisina*. Selama periode ini, pers fakultas memfasilitasi transmisi informasi, baik dalam isu intrakampus maupun ekstrakampus di lingkungan UGM. Nihilnya pers mahasiswa di tingkat universitas dapat diartikan dalam beberapa hal. *Pertama*, keberpihakan UGM cenderung berlawanan dengan arus utama pemberitaan dalam kerangka konsolidasi tatanan baru. *Kedua*, sivitas akademik UGM merasa puas dengan pemberitaan yang diproduksi di ranah nasional. Sejauh mana kedua hal ini dapat dibenarkan, penelitian lebih lanjut masih harus dilakukan.

Periode Proliferasi: Gelora Mahasiswa, 1974–79

Setelah masa konsolidasi selesai, peran pers mahasiswa tidak lagi diperlukan untuk mengganyang musuh bersama. Dalam kongres ke-III pada 1971, setelah melalui perdebatan panjang, IPMI memberlakukan instruksi “kembali ke kampus”.¹³ Instruksi tersebut, secara serentak, membawa pers mahasiswa yang selama masa konsolidasi bermain di tataran nasional untuk kembali mengangkat isu seputar kampus. *Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia*, dan *Mimbar Demokrasi*, yang membangkang dari instruksi tersebut, mengalami pemberedelan pada 1974. Meskipun begitu, pada gilirannya, pergeseran cakupan spasial ini tidak selamanya disertai dengan menghilangnya kritisisme. Dalam konteks ini, ketegangan identitas berada pada posisi jurnalistik-intrakampus.

11. Siregar, 101.

12. Fathan Nur Hamidi, “Peran Harian Kompas dalam Memelihara Pluralitas di Indonesia,” Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 49.

13. David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia*, (Nedlands: University of Western Australia Press, 1994), 111.

Dalam kondisi objektif semacam itu, Rektor Soeroso H. Prawirohardjo mencetuskan gagasan untuk mendirikan pers mahasiswa tingkat universitas. Gagasan tersebut terealisasi pada masa Rektor Sukadji Ranuwihardjo, yang menjabat pada 1973–1981. Pada Mei 1974, *Gelora Mahasiswa*, pers mahasiswa generasi kedua, terbit. Sebagai pers mahasiswa bentukan rektor, *Gelora Mahasiswa* memuat informasi seputar kampus dan kemahasiswaan yang relatif aman. Itu sebabnya, sebagian catatan sejarah menamai periode tersebut sebagai masa “bulan madu” antara rektorat dan pers mahasiswa.

Kelahiran *Gelora Mahasiswa* tidak dapat dilepaskan dari semangat “kembali ke kampus” yang sedang melanda pers mahasiswa di aras nasional. Orientasi tersebut turut berimplikasi pada proliferasi pers mahasiswa di berbagai kampus, seperti *Kampus* di Institut Teknologi Bandung (1974), *Derap Mahasiswa* di IKIP Yogyakarta (1974), *Salemba* di Universitas Indonesia (1975), dan *Arena* di IAIN Sunan Kalijaga (1975). Sebagian besar pers mahasiswa tersebut, setidaknya pada periode permulaan terbit, menginduk secara institusional pada rektorat. Ketertundukan tersebut menyebabkan orientasi pemberitaan pers mahasiswa tidak hanya tak kuasa melampaui sekat-sekat geografis intrakampus, tetapi juga mandul dalam menyajikan pemberitaan yang kritis terhadap birokrat universitas.

Meskipun sejumlah media baru terbit pada periode 1970-an, denyut lemah kehidupan organisasi pers mahasiswa nasional sudah terendus sejak ketegangan tak terpecahkan antara hidup di dalam

kampus atau di luar kampus. Perdebatan ini mewarnai kongres IPMI ke-II pada 1968, ke-III pada 1971, dan ke-IV pada 1976, yang menyebabkan pergerakan IPMI makin tak terarah. Di tengah ketegangan tersebut, IPMI bersiteguh mempertahankan independensi terhadap pihak mana pun, termasuk negara. Independensi ini serupa dengan sikap yang diambil IPMI pada 1960-an. Ketika dituduh sebagai antek-Masyumi dan anti-Manipol Usdek lantaran tidak mencantumkan konsepsi tersebut dalam anggaran dasarnya, IPMI menerbitkan maklumat yang menegaskan bahwa mereka bukan media kontrarevolusi. Sikap ini, pada gilirannya, menjadi bumerang ketika rezim Soeharto makin mapan sekaligus otoriter.

Orientasi untuk “mencari aman” memudar ketika, meminjam istilah Ni’am, pers mahasiswa mengalami “pengerasan ideologi” menjelang Pemilihan Umum 1977.¹⁴ Isi pemberitaan pers mahasiswa, pada masa ini, mulai berani melampaui diskursus klise kemahasiswaan dengan mencuatkan kritik terhadap kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun rektorat. Pergeseran ini selaras dengan gerakan menolak pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden yang sedang masif di berbagai daerah. Melihat kondisi tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Pada 1978, pers mahasiswa di seluruh Indonesia dibekukan. *Gelora Mahasiswa*, seperti kesaksian Edhi Martono, dilarang terbit selama enam bulan.¹⁵ Setelah terbit kembali, pada 1978, *Gelora Mahasiswa* menerbitkan berita yang mengkritik wacana Rektor Sukadji untuk memonopoli praktik NKK/BKK di UGM.

14. Ni’am, 182–190.

15. Ni’am, 182–190.

Berita itu berjudul “Soal BKK: Sukadji Yang Akan Digantung”. Rektor pun naik pitam. Pada 1979, Gelora Mahasiswa kembali dilarang terbit. Namun, kali ini, pelarangan tersebut berlaku bukan untuk enam bulan, melainkan selamanya.

II. Generasi Kedua, 1985—2012

Periode Orientasi: Majalah Mahasiswa Balairung-ilmiah (1985—89)

Selama lima tahun berikutnya, pers mahasiswa di UGM kembali mengalami kekosongan di tingkat universitas. Upaya mengisi kekosongan tersebut, sebenarnya, pernah beberapa kali dilakukan. Namun, tidak satu pun dari upaya tersebut mampu bertahan. Situasi tersebut bertahan sampai Oktober 1985. Agus Aman Santosa dan Muhammad Alfaris,¹⁶ perwakilan *Clapeyron*, pers mahasiswa di Jurusan Teknik Sipil menghadap Teuku Jacob, Rektor UGM saat itu, untuk melakukan wawancara. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyampaikan niat untuk mengadakan seminar dan pameran pers mahasiswa se-Indonesia. Di luar dugaan, Teuku Jacob, mantan pegiat pers mahasiswa era 1950-an itu, segera menerima rencana tersebut. Bahkan, ia melemparkan gagasan yang lebih gila, yaitu seminar jurnal mahasiswa internasional. Tak pelak, respons tersebut menyulut semangat para perwakilan *Clapeyron* untuk segera mempersiapkan seminar nasional tersebut.

Namun, birokrasi tidak semudah itu ditembus. Setelah pertemuan pertama dengan Teuko Jacob, amat

sulit mengatur pertemuan berikutnya. Teuku Jacob justru mempersilakan perwakilan *Clapeyron* menghadap Soepono, Pembantu Rektor III, yang mengatakan akan membicarakan rencana tersebut terlebih dahulu di Rapat Kerja Universitas. “Silakan, dalam beberapa hari, Saudara datang lagi,” ujar Soepono.¹⁷ Tiga hari kemudian, pada pertemuan berikutnya, Soepono justru mengatakan pihak rektorat tidak mengizinkan seminar nasional dan pameran jurnal mahasiswa internasional tersebut. Keputusan ini diambil karena dua pertimbangan. *Pertama*, situasi politik nasional yang saat itu belum memungkinkan, terlebih panitia berencana mengundang Fuad Hassan, yang baru saja dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. *Kedua*, kondisi pers mahasiswa di internal UGM belum mapan. Saat itu, UGM belum memiliki pers mahasiswa di tingkat universitas. Pers mahasiswa di tingkat fakultas dan jurusan pun masih kembang-kempis.

Tak pelak, perdebatan pun mengikuti keputusan tersebut. Abdulhamid Dipopramono, salah seorang pimpinan *Clapeyron*, yang sudah menghubungi para pembicara, tidak memiliki banyak pilihan. Sejumlah pembicara, termasuk Koesnadi Hardjosoemantri, yang saat itu menjabat Sekretaris Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sudah mengonfirmasi akan hadir. Abdulhamid berkeras bahwa beberapa acara yang diadakan di UGM sebelumnya berhasil mendatangkan menteri. Sementara itu, upaya-upaya

16. Dalam berbagai arsip, Agus Aman Santosa dan Muhammad Alfaris sering kali disebut sebagai “dua orang pimpinan *Clapeyron*” saja. Penulis merasa perlu memberi ruang bagi kedua sosok yang pertama kali meletakkan batu bata bagi pers mahasiswa kontemporer di UGM. Bincang dengan Abdulhamid Dipopramono, 1 Desember 2022.

17. “Episode-Episode Perjalanan,” *Balairung*, Edisi Ulang Tahun 1987, 63–69.

untuk mendirikan pers mahasiswa di tingkat universitas selalu mengalami penolakan. Soepomo menyanggah bahwa mereka sudah diberikan pendanaan, tetapi pada akhirnya tetap tak mampu bertahan. Akhirnya, perdebatan tersebut mengambil jalan tengah untuk menggairahkan terlebih dahulu kehidupan pers mahasiswa intrakampus melalui seminar pers mahasiswa se-UGM. Setelah seminar tersebut membuahkan hasil, Soepomo menjanjikan akan menandatangani proposal untuk mengadakan seminar nasional.

Seminar pers mahasiswa se-UGM berhasil terselenggara pada 29 Oktober 1985. Seminar tersebut memiliki tiga tujuan. *Pertama*, merumuskan konsep pers mahasiswa ideal. *Kedua*, menerbitkan pers mahasiswa tingkat universitas. *Ketiga*, merangsang gairah pers mahasiswa di tingkat fakultas dan jurusan. Untuk mencapai orientasi tersebut, lima orang dari golongan mahasiswa mendapatkan kesempatan berbicara, yaitu Ana Nadhya Abrar (*Sintesa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Abdulhamid Dipopramono (*Clapeyron*, Jurusan Teknik Sipil), Laksono T. Sulaiman (*Medisina*, Fakultas Kedokteran), Agus Ibar Santosa (*Primordia*, Fakultas Pertanian), dan M. Thoriq (*Equilibrium*, Fakultas Ekonomi). Selain itu, Koesnadi Hardjosoemantri dan beberapa pakar turut urun rembuk dalam diskusi. Kesepakatan untuk membentuk pers mahasiswa di tingkat universitas menandai kelahiran pers mahasiswa generasi ketiga, yaitu *Balairung*.

Majalah mahasiswa *Balairung*, begitu semula ia dikenal, tak begitu mengandung nilai jurnalisme yang

kental pada awal permunculannya. Pada terbitan perdananya, *Balairung* mengangkat tajuk "Industrialisasi Khas Indonesia". Edisi tersebut memiliki rubrik andalan, seperti "Temu Wicara" dan "Tulisan Ilmiah". Rubrik pertama merupakan catatan diskusi tentang tema yang diangkat dalam majalah. Rubrik ini kemudian bertahan menjadi mahkota majalah tersebut sampai pengujung 1990-an. Sementara itu, rubrik kedua kemudian bertransformasi menjadi "Artikel Tema". Keduanya tidak digarap menggunakan pendekatan jurnalistik. Minimnya pendekatan jurnalistik dalam beberapa terbitan perdana setidaknya menunjukkan orientasi awal substansi produk *Balairung* yang cenderung ilmiah. Tidak mengherankan, Dhakidae kemudian berseloroh majalah ini merupakan implikasi agenda depolitisasi mahasiswa yang dicanangkan Orde Baru melalui pemberlakuan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).¹⁸ Ni'am meluruskan bahwa pemberedelan *Gelora Mahasiswa* pada awal NKK/BKK dan kemunculan *Balairung* tidak terjadi dalam satu napas.¹⁹ Namun, penulis beranggapan, dalam batas-batas tertentu, kultur diskusi yang lebih dominan dibandingkan aktivisme turut menentukan jati diri *Balairung* pada awal kemunculannya, walaupun jelas *Balairung* bukan merupakan bentukan aparatus Orde Baru.

Orientasi tersebut muncul sebagai hasil pembacaan terhadap kondisi sosial-politik saat itu. Abdulhamid menyebut bahwa para pegiat pers mahasiswa harus mengadakan demitosisasi terhadap pers mahasiswa. Sesuatu yang, pada

18. Ni'am, 182–190.

19. Ni'am, 182–190.

masa kemudian, akan sangat sering didengungkan. Wacana meluruhkan mitos-mitos pers mahasiswa hampir selalu muncul ketika para pegiat pers mahasiswa pada suatu masa mengadakan komparasi dengan kiprah pers mahasiswa pada periode konsolidasi masa lalu. Kiprah tersebut sering kali mengalami romantisasi, baik oleh para pegiat pers mahasiswa pada masa itu maupun penerus-penerus mereka. Para pegiat pers mahasiswa era 1980-an memanifestasikan demitosisasi pers mahasiswa dengan menekankan orientasi ilmiah. Reorientasi ini tidak lepas dari karakteristik mahasiswa saat itu yang lebih menekankan intelektualitas melalui laku ilmiah alih-alih aktivisme secara langsung. Sejumlah perintis pada masa awal *Balairung* pun dikenal sebagai pegiat kelompok studi. Tidak mengherankan, ketika Koesnadi tidak mengizinkan *Balairung* terbit kembali sebelum mengantongi Surat Tanda Terdaftar, mereka mengisi kekosongan kegiatan penerbitan dengan kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi semacam ini kemudian dibakukan sebagai program Dua Mingguan Balairung yang pertama kali terselenggara pada 28 Oktober 1986.

Periode Konsolidasi: Majalah Mahasiswa Balairung-jurnalistik (1989–98), Surat Kabar Mahasiswa Bulaksumur (1991–sekarang), dan Newsletter Gugat (1998)

Balairung tak selamanya memegang orientasi ilmiah dalam pendekatannya. Sejak 1989, *Balairung*, yang mulai dinaungi oleh Badan Penerbit Pers Mahasiswa (BPPM) UGM, mulai menggunakan pendekatan jurnalistik untuk mengupas isu yang dekat dengan

iklim pergerakan dan kemahasiswaan. Majalah Edisi 10, misalnya, mengangkat tema prostitusi mahasiswa dengan judul mencolok, yaitu “Mahasiswa Itu Sampai Mencium Kaki Saya”. Seperti tertulis dalam rubrik “Selintas Balairung” pada *Balairung* Edisi Khusus Tahun VIII/1994, selama dua sampai tiga tahun berikutnya, *Balairung* cukup fokus menggarap isu kampus.²⁰ Langkah ini diambil mengingat kondisi kampus saat itu mulai secara sepihak mengambil kebijakan yang banyak mengundang pergolakan. Selain itu, kondisi gerakan saat itu dinilai mandul dalam menggalang resistensi yang mampu mendorong perubahan. Kondisi semacam ini memantik para pegiat *Balairung* menggarap tajuk-tajuk seperti “Kemana Gerakan Mahasiswa Pergi” (1988), “Menggugat Peran (Politik) Mahasiswa” (1990), dan “Membenahi Strategi Pendidikan Tinggi” (1991).

Keputusan *Balairung* melancarkan kritik terhadap kondisi gerakan pada awal 1990-an, pada gilirannya, mengundang kritik. Pada masa itu, para pegiat mahasiswa yang sebagian besar merupakan para pegiat kelompok studi menuding *Balairung* telah mengkhianati gerakan. *Balairung* telah menjadi oportunist, tuding mereka. Sebuah arsip foto, misalnya, menunjukkan aksi yang diduga merupakan protes terhadap *Balairung* karena mengkritik gerakan pada awal 1990-an.

Biar pun menerima banyak kritik, tampaknya, keberanian *Balairung* menandai dimulainya resistensi mahasiswa yang masif terhadap Orde Baru sepanjang 1990-an. Kebangkitan gerakan berlangsung seiring dengan perluasan cakupan spasial tema-tema

20. Kurniawan, “Membuka Jendela, Memanah Rembulan: Orientasi Redaksional Sebuah Majalah Mahasiswa,” *Balairung*, Edisi Khusus Tahun VIII/1994, 113–116.



Gambar 1. Protes terhadap *Balairung*. Sumber: Arsip BPPM Balairung UGM.

yang diangkat *Balairung*. Sepanjang dekade tersebut, kita bisa membaca tajuk-tajuk seperti “Ideologiku Terbang Tinggi” (1993), “Kalau Serdadu Rindu Toga” (1994), “Kisah Politikus di Luar Jalur dari Tuduhan Ekstrim Kiri sampai Kanan” (1995), “Gerakan Mahasiswa Era 90-an Diaspora Kekuatan yang Siap Meledak” (1997), “Gerakan Buruh Dijerat Korporatisme Negara” (1997), “Hitam-Putih Pasca-Soeharto” (1998), “Carut Marut Gerakan Kerakyatan Menggapai Impian Perubahan” (1998), dan “Bebas Hambatan Ideologi Kiri” (1998).

Periode konsolidasi pers mahasiswa makin menguat dengan kehadiran berbagai selebaran yang bersifat temporer, seperti *Gugat* di UGM, *Bergerak!* di Universitas Indonesia, dan *Suga Alternatif* di Universitas

Padjadjaran. Selebaran-selebaran tersebut bertujuan untuk mengamplifikasi pemberitaan tentang substansi dan eskalasi gerakan. *Gugat* terbit dengan oplah 300–400 eksemplar setiap Senin dan Kamis sejak 25 April–4 Juni 1998.²¹ Langkah semacam ini diambil karena pers umum memilih bungkam terhadap kebobrokan Orde Baru dan wacana Reformasi. Selain itu, pemberitaan tentang aksi demonstrasi pun tidak mendapatkan porsi sebagaimana layaknya. Kebungkaman tersebut dapat dipahami sebagai implikasi pembatasan kebebasan pers yang diberlakukan pemerintah Orde Baru. Tidak jarang, pers umum yang dinilai mengancam kedaulatan pemerintah kemudian mengalami pemberedelan, seperti *DeTIK*, *Editor*, dan *Tempo* pada 1994. Kondisi

21. Titi Hidayatun, “Jurnal Balairung and Its Existence in Gadjah Mada University,” Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006), 15.

semacam ini nyaris serupa dengan periode konsolidasi pers mahasiswa pada awal pendirian Orde Baru. Pers mahasiswa memiliki segmentasi pembaca yang luas, bahkan mampu bersaing dengan pers umum. Majalah *Time* di New York, dalam memberitakan gerakan reformasi terhadap Orde Baru, bahkan menjuluki pers mahasiswa sebagai “*The Actor Behind the Scene*”.²²

Upaya *Balairung* memperluas cakupan pemberitaan menuju isu-isu nasional dibarengi dengan kebijakan merintis media komunitas kampus. Sementara *Balairung* bertaruh di kancah nasional, media komunitas ini akan secara kritis mengisi pemberitaan kampus. Media komunitas itu bernama surat kabar mahasiswa *Bulaksumur*. Para pegiat *Balairung* saat itu menilai majalah yang terbit tiga bulan sekali kurang memadai untuk mengakomodasi berita-berita kampus dan sekitarnya yang mengalir cepat. *Bulaksumur* akan mengisi kekosongan tersebut. *Bulaksumur* terbit perdana dalam bentuk tabloid pada 13 Juli 1991. Abdul Rahman mencatat perbedaan di antara *Balairung* dan *Bulaksumur* pada rubrik “Dapur” *Balairung* Nomor 14/Tahun V/1991, sebagai berikut:

“Dalam hal ini ada pembagian tugas antara *Balairung* dan *Bulaksumur*. *Bulaksumur* praktis hanya menyajikan berita-berita cepat di sekitar kampus UGM. Sedangkan *Balairung* lebih pada penyajian tulisan dan berita-berita yang sedikit banyak dibungkus dengan telaah ilmiah.”²³

Kebijakan ini mengakibatkan *Balairung* “terpaksa” meninggalkan beberapa rubrik yang selama ini memuat berita seputar kampus, seperti “Jerat”, “Catatan Peristiwa”, dan “Pojok”. Sebagai gantinya, *Balairung* memunculkan dua rubrik baru, yaitu “Jepret” dan “Humaniora”. Meskipun memiliki produk berbeda, *Balairung* dan *Bulaksumur* berada di bawah satu atap BPPM UGM. Hal ini membuat BPPM UGM kemudian memiliki tiga departemen, yaitu Departemen Penerbitan majalah *Balairung* (diketuai Abdul Rahman), Departemen Penerbitan surat kabar *Bulaksumur* (diketuai Didik Supriyanto), dan Departemen Pelatihan dan Pengkajian. Namun, konflik internal membuat *Bulaksumur* memisahkan diri dari *Balairung* pada Juli 1997.²⁴ Konflik tersebut antara lain disebabkan *Bulaksumur* merasa mampu mengelola organisasi secara terpisah dari *Balairung*. Konflik makin tak terjembatani ketika *Bulaksumur* mengubah format terbitannya dari tabloid menjadi majalah *Bulaksumur Pos*, yang terbit perdana pada 9 Mei 2000.

Kemunculan *Bulaksumur Pos* merupakan titik balik jurnalisme mahasiswa di UGM. Tabloid yang semula kritis terhadap kampus digantikan oleh majalah yang cenderung populer. Kebijakan ini dapat dipahami sebagai implikasi dari reorientasi pers mahasiswa pasca-21 Mei 1998 saat itu, yang cenderung mendorong pers mahasiswa untuk mencari lahan alternatif selain “politik”. Antariksa, Pemimpin Umum *Bulaksumur* 1999–2000, mencatat posisi *Bulaksumur* saat itu sebagai berikut:

22. Hasan Bachtiar, “The Actor Behind the Scene: Sekelumit Cerita Romantisme Pers Mahasiswa, Tradem Edisi V, April 2003, 5.

23. “Dapur”, *Balairung*, Nomor 14/Tahun V/1991.

24. Hidayatun, 14.

“Sementara tentang kebijakan DP dalam politik pers mahasiswa (lokal dan nasional), menurut catatan saya sejak Rapat Kerja di Kaliurang 22–23 Mei 1999 kita semua memang sudah menyetujui politik ‘tidak berpolitik’, artinya kita akan berposisi cenderung pasif. Waktu itu kita berhitung bahwa tenaga kita akan sudah cukup terkuras habis untuk mengurus diri kita sendiri. Jadi perlu dicatat di sini, ini bukannya karena kita adalah organisasi yang egois dan apolitis, ini sekedar hitungan taktis. Yang juga masih berkaitan dengan hubungan Bulaksumur dengan lembaga lain, adalah sejak awal kepengurusan kita memutuskan untuk tidak mengikuti ISAI Awards karena kita merasa bahwa sistem penilaian ISAI cenderung tidak adil bagi media kita dan juga karena kita tak mau lagi dijadikan alat bagai (sic) ISAI untuk mengeruk uang dari luar negeri.”²⁵

Bagi para pegiat *Bulaksumur* sendiri, *Bulaksumur Pos* merupakan “prestasi terbesar kepengurusan” saat itu. Sebuah produk yang “tidak ada yang dapat dikatakan tentang media ini, karena ia nyaris sempurna”.²⁶ Anggapan semacam ini tidak mengherankan muncul dalam kepengurusan yang, menurut pengakuan mereka sendiri, memiliki “kecenderungan positif untuk bersikap ‘nothing to lose’ dan tidak terlalu mengikatkan diri dengan masa lalu”.²⁷ Mereka merasa kecenderungan tersebut membuat *Bulaksumur Pos* “sangat berhasil sebagai media dan sebagai model organisasi”. Sejak masing-masing organisasi memiliki struktur, produk, dan terutama, karakteristik sendiri; upaya memandang BPPM UGM sebagai satu kesatuan tampak

begitu sulit. Didik Supriyanto menyebut independensi *Balairung* dan *Bulaksumur* satu sama lain merupakan “salah kaprah yang berkelanjutan”.²⁸ Meskipun jelas, setiap periode kepengurusan memiliki otoritasnya sendiri untuk membaca zaman, gagasan awal menerbitkan tabloid kampus sesungguhnya tak lebih dari upaya memperluas produk pers mahasiswa UGM supaya sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika. Upaya memandang BPPM UGM sebagai satu kesatuan, sebagaimana pihak kampus memandang mereka, tidak lagi sederhana urusan mengintegrasikan produk majalah dan tabloid. Upaya tersebut merupakan agenda menyatukan dua pendekatan dan prinsip-prinsip jurnalisme yang berbeda. Sulit, bahkan, mustahil.

Selain itu, periode konsolidasi jilid kedua juga ditandai dengan upaya menghidupkan kembali IPMI, yang tidak terdengar lagi semenjak kongresnya pada 1982.²⁹ Gagasan ini awalnya dicetuskan oleh Koesnadi Hardjosoemantri pada acara Pendidikan Pers Mahasiswa Se-Indonesia yang diselenggarakan oleh *Balairung* pada 1987. Pembicaraan di sela-sela acara tersebut menghasilkan keputusan untuk membentuk panitia yang terdiri dari dua poros, yakni Poros Yogyakarta dan Poros Jakarta. Penanggung jawab Poros Yogyakarta diemban oleh Abdulhamid Dipopramono dari *Balairung*, UGM; dan Imran Aziz dari *Arena*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sementara itu, penanggung jawab Poros Jakarta diemban oleh Rizal

25. Catatan Pemimpin Umum Bulaksumur 1999–2000.

26. Catatan Pemimpin Umum Bulaksumur 1999–2000.

27. Catatan Pemimpin Umum Bulaksumur 1999–2000.

28. Bincang dengan Didik Supriyanto, 28 Oktober 2022.

29. “Menuju Konsolidasi Pers Mahasiswa Indonesia,” *Balairung*, Nomor 7 Tahun III/1988, 39–41.

Pahlevi Nasution dari *Media Publika*, Universitas Mustopo Beragama; dan Imran Zein Rolas dari *Politika*, Universitas Nasional. Sejumlah pertemuan nasional diselenggarakan untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, seperti Sarasehan Aktivistis Pers Mahasiswa di Kuningan pada 18–20 September 1987, Temu Aktivistis Pers Mahasiswa di Kaliurang pada 11–1 Oktober 1987, dan Pekan Orientasi Jurnalistik Mahasiswa di Jakarta pada 17–27 Oktober 1987. Upaya mengaktifkan kembali IPMI rupanya berlangsung alot. Situasi politik nasional yang ketat menjadi penghalang besar. Akhirnya, setelah melalui beragam kendala, Kongres Pers Mahasiswa Se-Indonesia di Malang pada Oktober 1992 menyepakati pembentukan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI).

Periode Proliferasi: Jurnal Mahasiswa Balairung-ilmiah dan jurnalistik (2001–16), Buletin Balkon-jurnalistik (2000–16), Balairung.org (2000–04), Balairung.web.id (2004–08), Balairungpress.com (2008–10), dan Bulaksumur Pos (2000–sekarang)

Soeharto memutuskan mundur dari jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Era baru sarat kebebasan dan keterbukaan pun dimulai. Pers umum, yang semula tiarap, mendapatkan jaminan kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal ini, pada gilirannya, membuat mereka berani mengangkat isu-isu nasional yang cenderung sensitif. Media arus utama yang memberi tempat bagi gerakan Reformasi pun tumbuh bak cendawan di musim hujan. Meskipun

kegelisahan untuk meninggalkan “jurnalisme caci-maki”³⁰ mulai muncul menjelang kejatuhan Soeharto pada 1997, keterbukaan informasi tetap saja membuat pers mahasiswa kebingungan. Di satu sisi, mereka ingin mewartakan sesuatu yang memiliki signifikansi bagi pembaca. Di sisi lain, lahan garapan isu nasional sudah diambil alih pers umum bermodal besar. Melihat kondisi tersebut, *Balairung* menginisiasi Sarasehan Pers Mahasiswa Se-Jawa dan Bali pada 2 November 1998. Sarasehan bertajuk “Mencari Ruang di Era Keterbukaan” tersebut berusaha membaca sejarah pers mahasiswa, situasi politik nasional, dan posisi alternatif yang bisa ditempati oleh pers mahasiswa pada era transisi demokrasi.³¹ Dalam konteks ini, *Balairung* memilih untuk menghidupi kampus sebagai pers komunitas (*community newspaper*) dan menyeriusi peran sebagai pers wacana (*press of discourse*). Indi Aunullah, Pemimpin Umum *Balairung* periode 2003/2004, merangkum reposisi tersebut sebagai berikut:

“Jika dulu politik pemerintah yang represif dengan tangan-tangan NLL/BKK-nya yang membuat mahasiswa diam, sekarang melangitnya biaya pendidikan dan pembatasan masa studi yang dikhawatirkan banyak kalangan akan melahirkan mahasiswa kelas menengah yang *study-oriented*, tak lagi peka pada lingkungannya.”³²

Pers komunitas dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap konsep pers mahasiswa yang berada di negara-negara maju. Nugroho, dalam Bachtiar,

30. Asip Agus Hasani, “Era Baru Pers Mahasiswa,” *Balairung*, Nomor 25/Tahun XII/1997, 52.

31. Utomo, *Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan*, 52.

32. Indi Aunullah, “Tentang Sebuah BALAIRUNG: Tempat Belajar, Bekerja (dan Bermain),” tulisan untuk Musyawarah Kerja Semester Pertama BPPM Balairung UGM, tanpa tahun.

menjelaskan bahwa pers mahasiswa di negara-negara maju membatasi pemberitaan mereka pada peristiwa yang terjadi di dalam kampus.³³ Hal ini dilakukan karena mereka menilai pers umum, dengan keunggulan sarana dan keragaman pemberitaannya, hampir-hampir tidak menyisakan celah bagi pers mahasiswa untuk turut memberitakan isu nasional. Sementara itu, pers mahasiswa di negara-negara berkembang justru mendapatkan tuntutan untuk turut memberikan andil dalam memberitakan isu-isu nasional, baik karena keterbatasan pers umum maupun permasalahan negara yang “harus” direspons mahasiswa sebagai bentuk “kewajiban moral”. Namun, pasca-21 Mei 1998, para pegiat pers mahasiswa menimbang ulang argumen tersebut. Kondisi kebebasan sipil sudah jauh lebih membaik. Didik Supriyanto, Pemimpin Redaksi *Balairung* periode 1990, merekomendasikan pers mahasiswa untuk menyeriusi peran sebagai pers komunitas, dalam hal ini komunitas kampus. Sejak saat itu, *Balairung*, secara resmi, menidurkan produk majalah. Mereka mulai merab-raba bentuk paling ideal untuk mengejawantahkan pers komunitas, seperti *Balonline*, *Blup!*, *Balairung Buletin*, *Koran Balairung*, dan *Balairung Koran (Balkon)*.³⁴

Balonline, sebagai upaya merambah lanskap digital, sempat memperoleh 1.500 pengunjung sejak situs *balairung.tripod.com* ditubuhkan pada 1998. Namun, situs tersebut akhirnya digantikan dengan

Kampus Online hasil kerja sama dengan *detik.com* dan AJI pada Februari 1999. *Blup!*, mengambil motto “Memberi Tahu Orang UGM tentang UGM”, pertama kali direncanakan pada Oktober 1999. Namun, rencana tersebut tak mampu dipertahankan pada rapat kerja karena dianggap serupa dengan *Balonline*. Selain itu, sebuah arsip menunjukkan *Balairung* pernah berencana menerbitkan buletin yang dinamai *Balairung Buletin* dengan ruang lingkup berita yaitu “aktivitas yang ada di UGM”.³⁵ Produk ini direncanakan akan dikerjakan sepanjang Mei–Agustus untuk terbit pada September 1999. Namun, tidak terlalu jelas sejauh mana rencana tersebut dijalankan. Akhirnya, pada 25 April 2000, *Balairung* berhasil menerbitkan koran dinding berukuran A3 yang dinamai *Koran Balairung*.³⁶ Koran dinding ini merupakan bentuk keterlibatan *Balairung* dalam Komite Anti Otonomi Kampus (APIK), sebuah organisasi yang semula didirikan untuk menanggapi isu otonomi kampus, tetapi kemudian menjadi wadah kerja untuk mengadvokasi permasalahan pendidikan pada umumnya di UGM. Surat Pemberitahuan Nomor 20/UMUM/IV/2000 tentang Rencana Penerbitan menerangkan koran dinding tersebut diterbitkan dengan dua tujuan, yaitu:

1. Eksternal: mem-back up fungsi propaganda dan pendidikan Komite APIK terhadap civitas UGM akan persoalan-persoalan pendidikan pada umumnya di UGM.

33. Bachtiar, “The Actor Behind the Scene.”

34. Hery Trianto, “Tanpa Judul,” Laporan Pertanggungjawaban Kepala Penelitian dan Pengembangan *Balairung* periode 1999/2000, 3 Juni 2000.

35. “BALAIRUNG Buletin”. Tanpa tahun.

36. Sementara itu, Bachtiar menulis informasi yang sedikit berbeda. Menurut Bachtiar, koran dinding tersebut bernama *Balairung Koran*, berukuran A-2, dan terbit pertama kali pada April 1999. Lihat Bachtiar, “Bekerja Dengan Detail,” 181.

2. Internal: membumikan Balairung dalam komunitasnya sendiri atau Balairung mampu menjadi tuan rumah di 'negerinya' sendiri.³⁷

Sejak November 2000, setelah mencapai 13 edisi, *Koran Balairung* kembali mengalami transformasi. Para pegiat *Balairung* saat itu memilih untuk mengambil bentuk buletin atau *newsletter* mingguan 8 halaman, dicetak 2.000 eksemplar, dan disebar di sudut-sudut strategis Kampus UGM. Buletin itu bernama *Balkon*. Produk ini bertahan cukup lama melalui pendapatan dari iklan lokal, seperti warung internet, warung makan, kios fotokopi, *laundry*, toko buku serta alat tulis, dan lainnya.

Sementara itu, pers wacana merupakan pengembangan lebih lanjut dari orientasi awal *Balairung* untuk menengahkan intelektualitas. Orientasi ini sempat ditepikan ketika mereka sedang "dinas" terjun ke medan perang isu nasional sepanjang periode 1990-an. Meskipun begitu, orientasi ini muncul kembali pada majalah edisi khusus jurnal bertajuk "Mozaik Indonesia Masa Depan" pada 1994, "Menuju Masyarakat Dunia: Catatan untuk Indonesia" pada 1996, dan "Membayangkan Indonesia" pada 1999. Dalam rubrik "Dapur" edisi khusus jurnal pada 1996, Timbul Sunoto menulis bahwa jurnal mahasiswa merupakan obsesi yang sudah lama dicita-citakan para pegiat *Balairung*.³⁸ Pasca-21 Mei 1998, konsep pers wacana dimanifestasikan dalam bentuk jurnal mahasiswa, yang

memadukan pendekatan jurnalistik dan pendekatan ilmiah. Selain memuat artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dan penulis tamu, jurnal mahasiswa *Balairung* juga memuat tulisan hasil reportase dan wawancara mendalam.³⁹ Peluncuran jurnal edisi perdana bernomor 34, "Scripta Manent", dikabarkan membludak. Tema jurnal tersebut diambil dari adagium "*verba volat, scripta manent*" yang berarti "kata-kata lisan terbang, sementara tulisan menetap". Sesuai maknanya, jurnal tersebut mengupas industri perbukuan yang berhasil membuat sejumlah penerbit di Yogyakarta kebakaran jenggot. Beberapa hari setelah peluncuran, beberapa perwakilan industri penerbit tersebut mendatangi sekretariat *Balairung* untuk melancarkan teror. Namun, ancaman-ancaman akan membawa kasus ini ke meja hijau perlahan lindap ditelan waktu.

Selain itu, pada periode proliferasi jilid kedua, *Balairung* mulai merintis laman daring *Balairung Interaktif* yang beralamat di members.tripod.com/~balairung dengan menggandeng Kosudgamanet pada 1998. Tujuan utama pembangunan *Balairung Interaktif*, seperti dicatat Aris Purnomo, adalah "untuk menghadirkan pers mahasiswa kepada jenis informasi dan komunikasi perseorangan baru di masa depan, dan membawa semangat gerakan mahasiswa dan dunia pers mahasiswa Indonesia ke dalam jaringan komunikasi global".⁴⁰ Pada 24 Februari 2000, *Balairung* pun bekerja sama dengan *detik.com* dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk menyelenggarakan "Seminar

37. Surat Nomor 20/UMUM/IV/2000 tentang Pemberitahuan Rencana Penerbitan

38. "Dapur," *Balairung*, Edisi Khusus Jurnal Tahun 1996

39. Bachtiar, "Bekerja Dengan Detail," 181.

40. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Majalah *Balairung* Periode 1997/1998.

Cybermedia, Prospek Kampus Online”.⁴¹ Seminar tersebut bertujuan untuk merangsang tumbuhnya kesadaran akan pentingnya media daring di kalangan aktivis pers mahasiswa, menjajaki kemungkinan kerja sama antara AJI dan lembaga pers kampus untuk menyajikan informasi kampus lewat media daring, dan menciptakan peluang baru bagi pers kampus untuk dikelola secara lebih profesional. Namun, rencana tersebut perlahan kandas karena keduanya, baik pihak *Balairung* maupun *detik.com*, tidak secara proaktif menyierusi pengelolaan laman tersebut. Meskipun begitu, saat itu, *Balairung* telah memiliki Divisi Balairung Online yang bertugas mengelola laman daring. Seiring wacana migrasi ke laman daring, *Balairung* pun tercatat telah memiliki laman daring yang beralamat di *balairung.tripod.com* (1998), *balairung.org* (2000), *balairung.web.id* (2004), hingga *balairungpress.com* (2008).

Periode proliferasi jilid kedua juga menandai pecahnya PPMI. Arifin menyebut setidaknya ada tiga kelemahan yang dimiliki PPMI.⁴² *Pertama*, mekanisme kerja yang tidak memiliki kejelasan mengenai fungsi koordinasi, instruksi, dan sanksi. Ketidakjelasan ini menyebabkan pertemuan-pertemuan PPMI lebih menyerupai temu kangen alih-alih tukar pikiran yang konstruktif. *Kedua*, minimnya dana dan sarana. Permasalahan klise ini rupanya juga melanda PPMI, yang tidak menginduk pada organisasi atau lembaga donor mana pun. *Ketiga*, kualitas sumber daya manusia dan sistem keanggotaan yang terlalu lemah. Itu sebabnya, pada Kongres V di Lombok pada 24–29 Mei 2000, anggota PPMI terbelah menjadi

dua kelompok. Kelompok pertama tetap menginginkan organisasi tersebut bertahan dengan beberapa penyesuaian. Sementara itu, kelompok kedua yang tidak puas dengan kondisi PPMI, pada akhirnya, memilih membentuk Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Indonesia yang bersifat tidak mengikat. Meskipun begitu, sampai saat ini, nasib forum tersebut tidak memiliki kejelasan.

III. Generasi Ketiga (2012—sekarang)

Periode Orientasi: Majalah Balairung reborn (2012–15), Jurnal Mahasiswa Balairung (2000–16), Balairungpress.com-jurnalistik dan ilmiah (2010—sekarang)

Para pegiat *Balairung* tampaknya belum secara matang merumuskan produk yang akan menjadi manifestasi pers komunitas dan pers wacana ketika dua konsep tersebut pertama kali dicetuskan pada 1998. Hal ini dapat dilihat dari perdebatan yang segera muncul pada masa awal permunculan *Balkon*. Catatan-catatan laporan pertanggungjawaban para pengurus sekitar periode ini merekam perdebatan tak berujung antara melanjutkan atau menghentikan penerbitan *Balkon*. Sementara itu, jurnal mahasiswa tampaknya sulit untuk secara konsisten terbit tepat waktu sejak edisi perdana muncul pada 2001. Satu tahun berselang, kepengurusan periode 2001–02 rupanya memiliki pandangan yang sama sekali berbeda dengan pendahulu mereka. Alih-alih melanjutkan produk jurnal, Veronica Kusuma dan rekan memilih menerbitkan kembali produk majalah. Dalam Majalah Edisi 35, mereka mengangkat tajuk “Menengok Tradisi Pesisir”. Bachtiar,

41. Surat Permohonan Utusan Nomor 30/Um-Bal/II/2000.

42. Arifin, 83–86.

dalam perbincangan dengan penulis, menyebut alasan komersial menjadi faktor utama para pegiat satu tahun di bawahnya memilih menepikan produk jurnal.⁴³ Mereka menilai, produk jurnal susah mendatangkan iklan. Setelah satu edisi “pemberontakan” ini, produk jurnal kembali muncul sampai 2016, meski dengan periode terbit tidak terlalu konsisten.

Ni’am, meminjam istilah Sjahrir, menamai masa sekitar satu dekade pertama millennium ketiga sebagai “Periode Klimakterik”, yaitu suatu masa yang mengandaikan pengurusnya merasa nyaman sekaligus berat karena format penerbitan terdahulu harus ditinggalkan.⁴⁴ Itu sebabnya, tidak banyak perombakan substansial berarti pada periode ini. *Balkon*, selain jumlah halamannya yang selalu berubah, mengalami peragaman produk dalam bentuk *Balkon Spesial* sejak 2005.⁴⁵ Kelak, produk ini akan menjadi fondasi bagi majalah *post-reborn* pada 2017. Sementara itu, jurnal tetap terbit dengan segala kekalutan manajerialnya. Lebih dari sekali, jurnal terbit jauh melewati linimasa pengerjaan sehingga menjadi beban bagi pengurus berikutnya. Kondisi semacam ini melatarbelakangi *Balairung* mengistirahatkan jurnal dan buletin pada 2012. Selama satu tahun, kedua produk tersebut menghilang dari peredaran. Sementara itu, majalah mendadak terbit tiga kali, yaitu “Temuan BPK di UGM: Kejujuran dalam Pertaruhan”, “Tarik Ulur Eksekusi Tambang Kulonprogo”, dan “Jejak Langkah Media Rakyat”.

Adhi Pratama menyebut tahun itu sebagai Periode Defibrilasi.⁴⁶ Saat untuk mengendurkan urat syaraf, meregangkan otot, dan membaca ulang segala aktivitas organisasi. Satu tahun kemudian, jurnal dan buletin muncul kembali. Begitu juga majalah dan laman. Sejak 2012, muncul peragaman pemaknaan pers komunitas sebagai pers komunitas Yogyakarta, yang dimanifestasikan dalam bentuk majalah. Majalah *reborn* bertahan sampai 2015, tetapi pemaknaan pers komunitas dalam lingkup regional bertahan sampai waktu yang lebih lama.

Seiring menguatnya laman daring sebagai produk, *Balkon* perlahan dihapuskan. Gelagat menghapus *Balkon* sudah diduga setelah selama beberapa waktu *Balairung* hanya menerbitkan *Balkon Spesial*, sementara *Balkon* reguler menghilang dari peredaran. “Bukankah aneh sebuah produk spesial terbit sementara produk reguler menghilang,” demikian, kira-kira, pembacaan saat itu. *Balkon Spesial*, yang terakhir kali terbit pada Agustus 2016, sempat menyita perhatian lantaran disita oleh Resimen Mahasiswa ketika dibagikan pada acara penyambutan mahasiswa baru. Penyitaan ini disinyalir karena edisi tersebut memuat artikel yang menyinggung tentang Himpunan Mahasiswa Gay. Artikel tersebut muncul dalam rubrik “Eureka” berisi ulasan terhadap skripsi Muhamad Dany Nugraha, mahasiswa Antropologi tentang interaksi dan komunikasi organisasi tersebut. Sampai saat ini, dalang intelektual di balik penyitaan tersebut tidak diketahui.

43. Bincang dengan Hasan Bachtiar, 26 Juni 2022.

44. Ni’am, 182–190.

45. Adhi Anindyajati, “Balkon dan Perbaikan-Perbaikan Kecilnya,” Laporan Pertanggungjawaban Kreatif Produksi *Balkon*, 3 Desember 2005.

46. M. Adhi Pratama, “Periode Defibrilasi,” *Balairung*, Edisi 47/XXVII/2012, 60–61.

Sementara itu, *Balkon* reguler edisi masih dapat dijumpai sampai November 2016. *Balkon* edisi terakhir itu mengangkat tema tentang privatisasi pendidikan di UGM.

Periode Konsolidasi: Majalah Balairung post-reborn (2017—sekarang), Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia (2018—sekarang), Laman dan Kanal Balairungpress (2018—sekarang)

Daya magis defibrilator rupanya tak kuasa menyelamatkan ritme kerja *Balairung* dari kegamangan. Jurnal masih saja terbit ugal-ugalan. Sementara itu, majalah belum juga menemukan format ideal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pegiat periode 2018 yang sudah aktif memengaruhi pengambilan keputusan sejak 2017 memutuskan mengambil, setidaknya, tiga kebijakan. *Pertama*, melakukan redefinisi terhadap jurnal *Balairung* dari pendekatan jurnalistik dan ilmiah menjadi murni pendekatan ilmiah multidisipliner. Perubahan ini setidaknya menjawab kegelisahan tentang produk jurnal berpendekatan ganda yang sulit terbit teratur selama bertahun-tahun. “Antroposen”, tema pertama jurnal format baru, sukses mendulang atensi banyak pihak. Peluncuran jurnal, yang mendatangkan Jan Zalasiewicz secara daring, membludak. Peneliti asing, Leslie Sklaire, bahkan mengutip jurnal ini dalam salah satu tulisannya. Raja menyebut bahwa jurnal semacam ini merupakan cita-cita Abdulhamid dan rekan-rekannya sejak mendirikan *Balairung*.⁴⁷ Meski seluruh naskah di jurnal multidisipliner pertama ditulis oleh pegiat *Balairung*, pada edisi berikutnya, *Balairung* mulai membuka *call*

for papers untuk menjaring naskah dari luar.

Kedua, mengadakan pembaruan majalah dengan mengembangkan format *Balkon Spesial*. Majalah ini, merujuk generasi terbitnya, merupakan majalah *post-reborn*. Majalah *post-reborn* edisi perdana, “Mahasiswa Papua Terbelenggu Stereotip”, sempat mendapatkan masalah lantaran memuat halaman berisi kata-kata sambutan untuk mahasiswa baru, “selamat datang mahasiswa biasa di kampus yang biasa-biasa saja”. Meskipun permunculan kata-kata sambutan ini di edisi-edisi sebelumnya tidak mendapatkan masalah, pembina saat itu, Ika Dewi Ana, yang juga pegiat *Balairung* era 1990-an, meminta anak-anak didiknya mencantumkan penjelasan atas kata-kata tersebut, jika majalah tetap mau diedarkan. Alhasil, mereka pun terpaksa menempelkan catatan tentang rujukan makna kata-kata tersebut di setiap eksemplar majalah yang sudah dicetak.

Ketiga, membakukan produk audio-visual, yang sudah muncul sejak 2015 sebagai produk turunan *balairungpress.com*, yaitu laman untuk tulisan dan kanal untuk audio-visual. Meskipun begitu, tampak produk ini belum memiliki perumusan yang matang, baik dalam struktur Tim Kreatif maupun segmentasi produknya. Alhasil, produk ini belum memiliki keberlanjutan secara konsisten pada beberapa kepengurusan berikutnya.

Dalam hal jangkauan isu, fokus periode ini adalah melanjutkan upaya periode-periode sebelumnya untuk menyerasi isu-isu kampus dan regional. Pada 2018, *Balairung* menginisiasi Sarasehan Pers Mahasiswa Se-Yogyakarta, walaupun hasilnya

47. M. Unies Ananda Raja, “Sekelumit Pledoi, Penjelasan, dan Pesan,” *Balairung: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 1(2), 2018, 265–267.

tidak terlalu signifikan. Selain itu, periode ini ditandai dengan capaian untuk mencuatkan isu komunitas di aras nasional, dalam hal ini isu kekerasan seksual terhadap Agni, mahasiswi UGM saat melaksanakan KKN di Ambon. Capaian ini pun turut membuktikan ketajaman pena cukup untuk mendorong perubahan struktural dengan dibentuknya Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Penulis dan penyunting laporan utama berjudul “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan” itu pun sempat dipolisikan akibat tulisan tersebut. Mereka, pada akhirnya, mendapatkan Penghargaan Oktavianus Pugeau, penghargaan tahunan bagi para jurnalis yang berdedikasi melalui kerja-kerja jurnalistik. Sementara itu, Majalah Edisi 55 bertajuk “Melawan Perampasan, Merebut Hak atas Tanah” sempat menyita perhatian beberapa media nasional lantaran mengalami penyensoran dari pihak rektorat. Majalah yang mengusung tema tentang konflik agraria di Yogyakarta tersebut diminta pihak rektorat untuk dilakukan beberapa penyesuaian, mulai dari judul artikel, ilustrasi, foto, hingga *pull out quotes*. Musababnya, “tidak boleh mengkritik Sultan”.

Periode konsolidasi sesungguhnya menguat ketika negara berlaku represif dengan mengeluarkan senarai undang-undang yang tidak memihak masyarakat. Aksi demonstrasi pun meluas di berbagai daerah sejak September 2019. Seiring dengan eskalasi tersebut, *Balairung* pun memperluas jangkauan spasial dengan memberitakan isu-isu nasional, seperti rangkaian aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di Jakarta, Majalah Edisi 56 bertajuk “Senjata Itu Bernama Partai

Rakyat”, dan Majalah Edisi 57 bertajuk “Kebekuan Lembaga Pendidikan”. Wacana pembentukan partai rakyat merupakan pembacaan lebih lanjut atas bebalnya partai-partai konvensional dalam memproses undang-undang bermasalah. Para penggarap produk mengaku terinspirasi dari majalah pada periode konsolidasi sebelumnya, yaitu Majalah Edisi 25 bertajuk “Gerakan Mahasiswa Era 90-an Diaspora kekuatan yang Siap Meledak” yang terbit pada 1997. Sementara itu, “Kebekuan Lembaga Pendidikan” merupakan satire terhadap sistem pendidikan yang mengalami privatisasi. Lebih jauh, perluasan jangkauan spasial juga dilakukan melalui korespondensi dengan entitas mancanegara sejak 2018 dan mengalihbahasakan produk ke dalam bahasa Inggris sejak 2020.

Epilog

Ketegangan identitas menyeruak pada terbitan pers mahasiswa dari masa ke masa, tak terkecuali pers mahasiswa di UGM. Periode orientasi generasi pertama diawali dengan *Gadiah Mada* dan *Gama* yang masing-masing mengusung pendekatan ilmiah dan jurnalistik. Pada periode konsolidasi, UGM justru tidak memiliki pers mahasiswa di tingkat universitas. Oleh karena itu, dapat diasumsikan pers mahasiswa di kampus ini tidak turut menanam saham yang signifikan dalam pendirian Orde Baru. Pada periode proliferasi, terbitan-terbitan mahasiswa di ranah kampus menjamur pasca-1971. *Gelora Mahasiswa* pun terbit di UGM pada 1974. Surat kabar yang mula-mula fokus merespons isu kampus secara lunak ini, pada gilirannya, turut merespons isu nasional secara keras. Surat kabar ini dibunuh rektornya sendiri

pada 1979. Setelah kembali mengalami kekosongan selama enam tahun, para pegiat pers mahasiswa di tingkat fakultas membidani kelahiran *Balairung* pada 1985. Periode orientasi dimulai kembali.

Orientasi awal *Balairung* tampak jelas dari motto yang digunakan, “Nafas Intelektualitas Mahasiswa”. Mereka mengupas isu-isu melalui pendekatan yang cenderung ilmiah sampai reorientasi dilakukan pada 1989. Sejak Majalah Edisi 10, mereka mulai bereksperimen menggunakan pendekatan jurnalistik untuk mengupas isu-isu intrakampus. Sejak awal 1990-an, pendekatan jurnalistik tetap dipertahankan, tetapi jangkauan isu mulai menjamah isu-isu nasional yang sulit diharapkan muncul pada pers umum. Kebijakan ini mengantarkan *Balairung* pada periode konsolidasi jilid kedua sampai jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Setelah Reformasi mulai memberi ruang bagi kebebasan pers, *Balairung* kembali ke kampus dengan mengusung pendekatan jurnalistik dan ilmiah secara berimbang. Sejak periode proliferasi jilid kedua, pendekatan jurnalistik dan ilmiah tidak saling sikut mendominasi produk *Balairung*, tetapi berjalan beriringan.

Setelah mengalami periode orientasi singkat dengan mengistirahatkan jurnal dan menerbitkan majalah *reborn* pada 2012–16, redefinisi jurnal dan kemunculan majalah *post-reborn* pada 2017–18 menegaskan bahwa *Balairung* mulai menyikapi dualisme identitas secara matang. Meskipun begitu, tampaknya konsep pers komunitas dan pers wacana belum secara serius ditinjau ulang. Padahal, makna ganda “komunitas” dalam “pers komunitas” justru berpotensi mengaburkan orientasi awal perumusan konsep ini,

yaitu menubuhkan identitas sebuah komunitas. *Balairung*, sebagai bagian dari komunitas kampus, mewartakan berita seputar kampus tidak hanya untuk melayani kebutuhan informasi di sekitar komunitas tersebut, tetapi untuk mendefinisikan identitas komunitas sebagai definisi tandingan terhadap wacanahegemonik dari pihak lain.

Sementara itu, jelas wacana tidak lagi hanya muncul dalam produk jurnal, tetapi hampir di setiap produk yang dihasilkan *Balairung*. Wacana justru menjadi karakteristik *Balairung* sebagai media alternatif. Pembatasan pemaknaan pers wacana sebagai landasan produk jurnal hanya akan menjadikan *Balairung* terlalu berfokus pada aspek artifisial alih-alih esensial. Meskipun begitu, dualisme untuk “menubuhkan identitas” di satu sisi dan “melampaui komunitas” di sisi lain tampaknya akan tetap menjadi orientasi *Balairung* selama beberapa waktu mendatang. Corak terakhir dapat dilihat pada keberanian untuk mewartakan isu-isu di luar komunitas yang terpinggirkan dari pemberitaan arus utama, penyeriusan pendekatan ilmiah untuk mengakomodasi isu-isu yang secara geografis jauh dari jangkauan, dan penerjemahan serta pendistribusian produk-produk ke dalam bahasa Inggris dan masyarakat antarbangsa. Sejauh mana? Biarkan waktu menjawab.

[Penjaga Dapur]

Daftar Pustaka

Arsip dan Majalah

“BALAIRUNG Buletin”. Tanpa tahun. *Balairung*, Edisi Ulang Tahun 1987. *Balairung*, Nomor 7/Tahun III/1988. *Balairung*, Nomor 14/Tahun V/1991. *Balairung*, Edisi Khusus Tahun VIII/1994. *Balairung*, Edisi Khusus Jurnal Tahun

1996.
Balairung, Nomor 25/Tahun XII/1997.
Balairung, Edisi 32/Tahun XV/2000.
Balairung, Edisi 44/XXVI/2011.
Balairung, Edisi 47/XXVII/2012.
Catatan Pemimpin Umum *Bulaksumur*
1999–2000.
Gadjah Mada, Tahun 1, Nomor 1, April 1950.
Hery Trianto, “Tanpa Judul,” Laporan
Pertanggungjawaban Kepala
Penelitian dan Pengembangan
Balairung periode 1999/2000, 3 Juni
2000.
Indi Aunullah, “Tentang Sebuah
BALAIRUNG: Tempat Belajar,
Bekerja (dan Bermain),” tulisan
untuk Musyawarah Kerja Semester
Pertama BPPM Balairung UGM,
tanpa tahun.
Laporan Pertanggungjawaban Kepala
Penelitian dan Pengembangan
Majalah *Balairung* 1999/2000.
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus
Majalah *Balairung* 1997/1998.
Surat Permohonan Utusan Nomor 30/Um-
Bal/II/2000.
Surat Nomor 20/UMUM/IV/2000 tentang
Pemberitahuan Rencana Penerbitan.
- Pers Mahasiswa, *Tradem* Edisi V,
April 2003.
M. Unies Ananda Raja, “Sekelumit Pledoi,
Penjelasan, dan Pesan,” *Balairung:
Jurnal Multidisipliner Mahasiswa
Indonesia*, 1(2), 2018.
Titi Hidayatun, “Jurnal Balairung
and Its Existence in Gadjah Mada
University,” Skripsi, Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada, 2006.
Tirto Suwondo, *Karya Sastra Indonesia
dalam Majalah Gadjah Mada dan
Gama*, Yogyakarta: Balai Bahasa
Yogyakarta, 2006.
Wisnu Prasetya Utomo, *Pers Mahasiswa
Melawan Komersialisasi Pendidikan*,
Yogyakarta: Indie Book Corner, 2013.

Wawancara

- Abdulhamid Dipopramono, 1 Desember
2022.
Ana Nadhya Abrar, 5 November 2022.
Didik Supriyanto, 28 Oktober 2022.
M. Thariq, 29 Oktober 2022.
Hasan Bachtiar, 26 Juni 2022.

Artikel, Buku, dan Skripsi

- Amir Effendi Siregar, *Patah Tumbuh Hilang
Berganti*, Jakarta: Karya Unipress,
1983.
David T. Hill, *The Press in New Order
Indonesia*, (Nedlands: University of
Western Australia Press, 1994), 111.
Didik Supriyanto, *Perlawanan Pers
Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/
BKK*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
Fathan Nur Hamidi, “Peran Harian
Kompas dalam Memelihara Pluralitas
di Indonesia,” Skripsi, Jakarta: UIN
Syarif Hidayatullah, 2011.
Hasan Bachtiar, “The Actor Behind the
Scene: Sekelumit Cerita Romantisme